

## **Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua**

Elvira Rumkabu

Universitas Cenderawasih, Indonesia

ira\_hiers@yahoo.com

### **Abstract**

*The failure of development since the new order until the Jokowi era has become an important variable in understanding the roots of the Papuan conflict. The top-down, discriminatory and paternalistic character of development in the context of conflict remains dominant in various policies. As a result, development has failed to bring justice and prosperity to indigenous Papuans. On the other hand, armed civil resistance and civil resistance, which carry various issues and actors, continue to strengthen. This paper aims to analyze how the development agenda and its implementation have given meaning to the construction of Papuan identity. Development is seen as an instrument of subjugation that deepens the anger and injustice felt by Papua. Development failures that are intertwined with other conflict variables such as human rights violations, discrimination and political aspirations have also become the basis for the strengthening of Papuan resistance. At the same time, issues such as development and human rights are getting stronger in advocacy at the local, national and global levels.*

**Keywords:** *Development, Top-down, Paternalism, Armed Resistance, Civil Resistance*

### **Abstrak**

Kegagalan pembangunan sejak orde baru hingga era Jokowi telah menjadi variabel penting dalam memahami akar konflik Papua. Karakter pembangunan yang top-down, diskriminatif dan paternalisme dalam konteks konflik tetap dominan dalam berbagai kebijakan. Alhasil, pembangunan tidak berhasil membawa keadilan dan kesejahteraan bagi orang asli Papua. Sebaliknya, resistansi bersenjata (armed civil resistance) dan resistansi sipil (civil resistance) yang mengusung ragam isu dan aktor terus menguat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana agenda pembangunan dan implementasinya telah memberi makna terhadap konstruksi identitas Papua. Pembangunan justru dilihat sebagai instrumen penundukan yang semakin memperdalam amarah dan ketidakadilan yang dirasakan Papua. Kegagalan pembangunan yang berkelindan dengan variabel konflik lain seperti pelanggaran HAM, diskriminasi dan aspirasi politik juga telah menjadi basis bagi menguatnya resistansi Papua. Disaat yang bersamaan, isu-isu seperti pembangunan dan HAM semakin menguat dalam advokasi di level lokal, nasional dan global.

Kata Kunci : Pembangunan, Top-down, Paternalisme, Resistansi Bersenjata, Resistansi Sipil

### **Pendahuluan**

Kegagalan pembangunan yang menyebabkan amarah (*rage*), marginalisasi, kemiskinan, serta ketimpangan sosial sering dianggap sebagai penyebab masyarakat Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia. Akan tetapi, keluhan dan rasa frustrasi (*grievances*) masyarakat hanya akan dikonstruksi menjadi gerakan perlawanan (*resistance*) apabila ada kerangka identitas kolektif yang menjadi basis dalam melegitimasi resistansi sipil hingga bersenjata. Identitas bersama ini yang menjelaskan mengapa ada aspirasi penentuan nasib sendiri (*self-determination*) di Papua, tapi tidak dominan di kawasan Indonesia timur lainnya yang juga mengalami pola ketidakadilan sosial dalam karakter pembangunannya.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pembangunan dan praktek kekerasan yang legitimasinya memberi makna terhadap konstruksi ke-Papuaan dulu dan sekarang. Oleh karena itu, tulisan ini akan dibagi ke dalam tiga bagian. *Pertama*, Penulis akan mengelaborasi kompleksitas identitas Papua dan otonomi komunal yang telah dimiliki dan implementasikan dalam entitasnya. Penjelasan ini bertujuan untuk meluruskan kekeliruan terkait homogenitas Papua karena identitas, budaya, cara pandang, serta relasi antara manusia Papua dan tanah serta alamnya adalah sesuatu yang kompleks. Konsekuensinya, agenda pembangunan yang memiliki pola penyeragaman serta mengabaikan realita tersebut akan menemui berbagai resistensi. *Kedua*, Penulis akan menganalisis beberapa kebijakan utama pembangunan yang dielaborasi bersamaan dengan dinamika identitas dan resistansi itu sendiri di Orde Baru dan pasca reformasi. Meskipun konstruksi identitas Papua tidak terlepas dari faktor seperti persoalan status politik, pelanggaran dan kekerasan HAM, rasisme, maupun eksploitasi, namun fokus utama dari penelitian ini adalah pada berbagai kebijakan dan proyek pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi penyingkiran identitas Papua. *Ketiga*, Penulis akan menjelaskan bagaimana pembangunan memberikan makna bagi resistensi sipil Papua. Hal ini dilakukan dengan melihat varian resistensi Papua kontemporer yang menempatkan agenda pembangunan dalam isu advokasi gerakan.

Gagasan yang disampaikan tulisan ini adalah bahwa untuk memahami relasi antara pembangunan dan konflik Papua, perlu meletakkan kembali identitas dan budaya Papua sebagai basisnya. Tentu saja identitas ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang kaku melainkan cair, dinamis dan didefinisikan secara terus menerus sesuai dengan konteks dan relasi historisnya.

### Tinjauan Pustaka

Tanah Papua telah menjadi wilayah konflik berkepanjangan di Indonesia. Persoalan sejarah politik dan ketidakpuasan historis, ketiadaan rekognisi politik, kekerasan dan pelanggaran HAM, impunitas, kegagalan pembangunan, diskriminasi dan rasisme serta marginalisasi ekonomi telah menjadi akar konflik yang belum juga diselesaikan.<sup>1</sup> Di saat bersamaan, berbagai gerakan resistensi di Papua semakin meluas. Tidak hanya resistensi bersenjata, tapi juga resistensi sipil.

Resistansi sipil (*civil resistance*) yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah berbagai gerakan kolektif yang terorganisir dan tanpa kekerasan untuk mencapai tujuan politik, ekonomi dan sosial tertentu. Jason Macleod mendefinisikan resistansi sipil sebagai “*sustained, organized, unarmed and extra-parliamentary collective action in the pursuit of political, economic, and social goals.*” Sedangkan Vinthagen menekankan pada aksi kolektif yang ‘tidak mengandung kekerasan’ dan yang ‘melawan kekerasan’<sup>2</sup>. Penelitian ini akan melihat berbagai gerakan sosial dan politik yang ada di Papua yang memiliki visi dan strategi yang sama, dengan struktur jaringan yang tidak terpusat, sehingga komunikasi dan koordinasi di antara para anggotanya menjadi lebih efektif.

Salah satu platform gerakan sosial dan politik yang mulai menguat di Papua adalah terkait dengan isu penguasaan sumber daya alam maupun pembangunan berbasis kapitalisme yang menyingkirkan masyarakat adat. Isu tanah, teritori, dan akses ke sumber daya alam menjadi sangat sentral dalam hak masyarakat adat. Dalam Forum Permanen untuk Masyarakat Adat, sudah ditunjukkan bagaimana relasi antara masyarakat adat dan tanahnya: “*Land is the foundation of the lives and cultures of indigenous peoples all over the world. This is why the protection of their right to*

<sup>1</sup> Widjojo, Muridan S. ed, *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerjasama dengan KITLV, 2010). Lihat juga P2Politik-LIPI, *Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

<sup>2</sup> Vinthagen, *A Theory of Nonviolent Action : How Civil Resistance Works* (London: Zed Books, 2015).

*lands, territories and natural resources is a key demand of the international indigenous peoples' movement and of indigenous peoples and organizations everywhere... Without access to and respect for their rights over their lands, territories and natural resources, the survival of indigenous peoples' particular distinct cultures is threatened... In order to survive as distinct peoples, indigenous peoples and their communities need to be able to own, conserve, and manage their territories, lands, and resources*"<sup>3</sup>

Otonomi komunal dalam mengatur sumber daya inilah yang merupakan bentuk penentuan nasib sendiri secara internal (*internal self-determination*) yang sudah ada jauh sebelum sistem negara modern ada. Kedaulatan *adat* ini kemudian diakui secara global dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Pasal 3 dan 4: "... *indigenous peoples have the right to self-determination... in exercising their right to self-determination, (indigenous peoples) have the right to autonomy and self-government in matters relating to their internal and local affairs:*".

Meskipun masyarakat adat memiliki budaya yang unik, sistem hukum dan pranata sendiri dalam mengatur dirinya, namun posisi masyarakat adat justru yang paling rentan dan termarginalkan di dunia. Tersebar dari Artic sampai ke Pasifik Selatan, jumlah masyarakat adat sekitar 370 juta yang mendiami 90 negara. Walaupun secara kuantitas masyarakat adat hanya berjumlah sekitar lima persen dari total populasi dunia, namun mereka berkontribusi pada 15 persen angka kemiskinan di dunia dan sepertiga dari yang sangat miskin<sup>4</sup>. Ketimpangan dan kemiskinan tersebut tidaklah terlepas dari praktek kolonialisme dan kapitalisme global. Praktek pembangunan yang menekankan pada akumulasi kapital telah mengeksklusi masyarakat adat. Menurut McMichael, globalisasi kontemporer hidup dengan melakukan tekanan dan eksploitasi terhadap sumber-sumber kekayaan alam di dunia belahan Selatan<sup>5</sup>. Kebijakan pembangunan yang eksploitatif di Tanah Papua pun tidak dapat dilepaskan dari fenomena akuisisi lahan global dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Laporan "Mama Ke Hutan" oleh Rassela Malinda menunjukkan pola pembangunan eksploitatif dan *top down* yang tidak hanya menyingkirkan partisipasi masyarakat adat Papua tapi juga menghancurkan sistem hidup mereka. Mereka dipaksakan untuk meninggalkan cara hidupnya agar bertransformasi menuju masyarakat pasar dalam menjawab kebutuhan akumulasi kapital. Pembangunan kapitalistik yang merangsek masuk melalui pembangunan telah memanifestasikan kuasa eksklusinya melalui regulasi, pemaksaan/kekerasan, pasar dan legitimasi<sup>6</sup>.

Savitri berargumen bahwa praktek perampasan tanah bukanlah sekedar bentuk marginalisasi terhadap orang Papua, melainkan sebuah proses dan hasil dari pembangunan ke-Indonesiaan di Papua. "*Perampasan tanah dari orang asli Papua bukan sekedar tindakan berdampak material (contohnya, pemiskinan secara ekonomi), tetapi sekaligus tindakan rasis, yaitu berupa pembunuhan kultural dan kerusakan ikatan kekerabatan. Oleh sebab itu, masalah tanah di Papua bukan lagi persoalan adat versus negara, melainkan masalah rasialisme dalam proses pembentukan negara Indonesia di Papua.*"<sup>7</sup> Menurutnya, proses 'menegarakan' (*state-making*) Indonesia di Papua dilakukan dengan mekanisme penyeragaman budaya, dan cara-cara rasis lainnya yang berlangsung bersamaan dengan pengambilan tanah dan alam Papua atas nama pembangunan.

Dalam proses pembangunan yang eksploitatif tersebut, resistensi masyarakat pun muncul dalam

<sup>3</sup> Asia Pacific Forum & Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (Jenewa : OHCHR,2013), 31-32.

<sup>4</sup> Lihat : International Fund for Agricultural Development, *Engagement with Indigenous Peoples Policy*, 2009.

<sup>5</sup> McMichael, "The Land Grab and Corporate Food Regime Restructuring." *Journal of Peasant Studies* 39(3-4) (2012), 216.

<sup>6</sup> Rassela Malinda, *Mama Ke Hutan* (Jakarta: Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, 2021).

<sup>7</sup> Savitri. "Menegarakan" Tanah dan Darah Papua." *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial* 38 (2020), 7.

berbagai gerakan sosial. Dough McAdam dalam Hanita menyebutkan bahwa simbol-simbol budaya dapat mendorong partisipasi seseorang atau sekelompok masyarakat untuk memiliki perasaan yang sama<sup>8</sup>. Budaya atau identitas yang terus dikembangkan akan membentuk tujuan dan visi kelompok masyarakat untuk melakukan gerakan. March Howard Ross berpendapat bahwa simbol budaya seperti tanah, agama dan bahasa dapat memfasilitasi partisipasi politik<sup>9</sup>. Berbagai resistansi masyarakat adat di Papua dapat dilihat sebagai gerakan sosial yang diorganisir dengan menggunakan simbol budaya dan digerakkan secara kolektif.

### Kompleksitas Identitas Papua

Papua tidak dapat dilihat sebagai identitas yang bersifat mutlak dan homogen. Keanekaragaman budaya menjadi basis dalam konstruksi identitas Papua dan resistensinya. Diversitas sosio-budaya tersebut tercermin dari berbagai aspek seperti kebahasaan, struktur sosial, sistem mata pencaharian, sistem kepercayaan hingga sistem politik tradisional. Sebagai entitas politik, suku bangsa di Tanah Papua juga memiliki sistem kepemimpinan politik yang berbeda. Mansoben mengklasifikasikan empat sistem kepemimpinan tradisional yakni sistem *big man* atau pria berwibawa, sistem kerajaan, sistem *ondoafi*, dan sistem campuran<sup>10</sup>. Dari segi Bahasa, tercatat ada lebih dari 300 bahasa lokal yang dituturkan di Tanah Papua, yang tergolong dalam dua rumpun yakni Austronesia dan Non-Austronesia.

Eksistensi berbagai suku bangsa pun dipertahankan melalui mitologi dan pandangan mesianis. Brevald Childs mendefinisikan mitos dan mitologinya sebagai “*suatu bentuk melalui mana struktur-struktur kenyataan yang ada dimengerti dan dipertahankan.*”<sup>11</sup> Dalam budaya Melanesia, mitos tidak hanya berfungsi mempertahankan struktur yang ada, tetapi juga berfungsi sebagai model atau rencana bagi perubahan yang diharapkan akan terjadi. Mitologi ini seperti terlihat : *koreri* dalam kebudayaan Biak, Numfor, dan Raja Ampat, *Pasai-Buri* di Nabire, Manokwari, Wondama, Bintuni dan sekitarnya, *Dema* dalam kebudayaan Marind Anim, Fumeripits dalam budaya Asmat dan sekitarnya, *Atoaripiti Bipiariipimera* dalam kebudayaan Kamoro, *Yeli* dalam budaya Yali, Mek dan Hubula, *nareekul* dalam budaya Habula di lembah Baliem, dan *Hai* dalam budaya Amungme.<sup>12</sup> Menurut Strelan “*Mitos diangkat secara terus-menerus, direvisi, dimodernisasi, dan dijadikan relevan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang bersifat eksistensial.*”<sup>13</sup>

Dalam relasi dengan suku bangsa lain di sekitarnya, kesadaran teritorial bagi setiap suku menjadi nilai sentral. Kesadaran ini diwujudkan melalui pembagian batas wilayah setiap klan atau suku dengan menggunakan sungai, gunung, bukit, dan petunjuk alam lainnya. Oleh karena itu, perang suku yang terjadi tidak hanya merupakan bentuk instrumen pembeda antara suku bangsa, namun juga merupakan cara mereka untuk mempertahankan integritas wilayahnya (*territorial integrity*). Ketika perang atau perselisihan antara suku terjadi, maka resolusi konflik yang berakar dari kulturnya akan dilaksanakan dalam menciptakan perdamaian, seperti mekanisme bakar batu atau bayar kepala.<sup>14</sup>

<sup>8</sup> Margaretha Hanita. *Cita-Cita Koreri: Gerakan Politik Orang Papua* (Jakarta: UI Publishing, 2019), 24-25.

<sup>9</sup> Hanita. *Cita-cita Koreri: Gerakan Politik Orang Papua*, 25.

<sup>10</sup> Johszua Robert Mansoben, *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya* (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1995), 42.

<sup>11</sup> John Strelan dan Jan. A. Godschalk, *Kargoisme di Melanesia: Suatu Studi tentang Sejarah dan Teologi Kultus Kargo* (Jayapura: Pusat Studi Irian Jaya, 1989), 117.

<sup>12</sup> Peyon, *Manusia Papua Negroid: Ras dan Ilmu dalam Teori Antropologi*.

<sup>13</sup> Strelan dan Godschalk, *Kargoisme di Melanesia*, 117.

<sup>14</sup> Lihat F. Maubak, “Ritual Bakar Batu sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Horizontal pada Masyarakat Adat Suku Dani di Timika Papua,” Disertasi Doktorat Program Studi Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2009.

Penjelasan tentang kompleksitas identitas tersebut menunjukkan adanya otonomi komunal yang dimiliki ragam suku bangsa di Tanah Papua. Mereka hidup sebagai entitas politik yang berdaulat (*sovereign*) secara tradisional dan menentukan kepengaturannya sendiri, baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Budaya dalam komunitas setiap suku bangsa adalah wujud relasi dengan alam dan lingkungannya. Budaya dan identitas inilah esensi tentang siapa mereka, bagaimana, dan dimana seharusnya mereka berada, serta bagaimana relasi mereka dengan kelompok masyarakat di luar komunitasnya.

### Representasi Negatif Papua

Kontak Papua dengan dunia luar (*outsiders*) memberikan makna bagi berbagai suku bangsa Papua untuk kembali melihat diri dan identitasnya. Kedatangan para ekspedisi Eropa, kolonial Belanda, hingga interaksi dengan Indonesia membawa serta pengetahuan (*knowledge*) versi mereka. Hegemoni pengetahuan inilah menjadi awal konstruksi rasial terhadap Papua dan pengalamannya. Menurut Martin Slama dan Munro, representasi yang dibangun *outsiders* terhadap Papua sebagai ‘zaman batu’ dan ‘primitif’ telah menjustifikasi berbagai misi untuk ‘memperadabkan’,<sup>15</sup> ‘memodernisasi’, ‘kristenisasi’, dan ‘islamisasi’ populasi lokal dan membentuk relasi hierarkis.<sup>16</sup>

Sejarah Papua kemudian dituliskan dengan kacamata penguasa. Pengenalan pengetahuan oleh kuasa dari luar secara perlahan-lahan membentuk kuasa pengetahuan terhadap *apa* dan *bagaimana* Papua. Ketika pembangunan pendidikan masuk melalui *zending* maupun program Papuanisasi masa Belanda, suku bangsa Papua mulai terhubung. Interkoneksi dan akulturasi budaya tersebut membuat masyarakat yang heterogen tadi merefleksikan pengalamannya dan masa depan melewati batas-batas kesukuannya. ‘Primitif’, ‘bodoh’, ‘terbelakang’, dan representasi negatif lainnya yang disematkan oleh *outsider* telah menjadi sebuah ideologi bagi mereka untuk ‘memahami diri sendiri’.<sup>17</sup> Pemahaman tersebut membentuk kesadaran kolektif tentang identitas mereka yang kemudian melahirkan sikap resisten.

Sejarah Papua membuktikan adanya sikap resistansi yang berakar dalam identitasnya ketika berinteraksinya dengan pihak luar (*other*). Saat Injil masuk ke Papua pada 5 Februari 1855, budaya adalah tantangan utamanya. Sehingga setengah abad setelahnya, kuburan Pendeta lebih banyak dibandingkan jumlah orang Papua yang dibaptis.<sup>18</sup> Resistensi berbasis identitas juga muncul dalam perlawanan masyarakat Amungme<sup>19</sup> ketika Freeport mulai beroperasi pada 1967. Menurut Giay dan Beanal, protes masyarakat Amungme ini didorong motif *Hai* yang mendambakan kehidupan lebih baik, kesejahteraan, rumah yang sehat dan kemakmuran serta pengakuan terhadap hak dan sejarahnya. *Hai* yang adalah sebuah mitologi dalam masyarakat tradisional Amungme kemudian

<sup>15</sup> Rupert Stasch, “From Primitive Other to Papuan Self: Korowai Engagement with Ideologies of Unequal Human Worth in Encounters with Tourists, State Officials and Education,” dalam *“From Stone-Age to Real-Time”: Exploring Papuan Temporalities, Mobilities, and Religiosities*, eds. Martin Slama dan Jenny Munro, (Canberra: Australian National University Press, 2015), 62-63.

<sup>16</sup> Martin Slama dan Jenny Munro eds., *“From Stone-Age to Real-Time”: Exploring Papuan Temporalities, Mobilities, and Religiosities* (Canberra: Australian National University Press, 2015).

<sup>17</sup> Rupert Stasch melihat bagaimana ‘primitif’ menjadi sebuah ideologi yang menghubungkan antara yang memberikan stereotip dengan yang mendapatkan stereotip dalam konteks masyarakat Korowai. Menurutnya, primitif telah menjadi instrumen bagi masyarakat Korowai untuk memahami dirinya sendiri (*self understanding*). Mereka merefleksikan kembali identitasnya dan melihat kebutuhan akan reformasi terhadap identitasnya. Hal ini menjelaskan perekatan antara suku bangsa yang beragam di Papua. Lihat Stasch, “From Primitive Other to Papuan,” 62-63.

<sup>18</sup> Hanita, *Cita-cita Korori: Gerakan Politik Orang Papua*, 65.

<sup>19</sup> Suku bangsa Amungme tinggal di lembah-lembah di antara wilayah administrasi Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak Jaya. Kontak pertama Amungme dengan pendatang dari luar diperkirakan terjadi pada 1912 hingga 1913. Lihat Hanita, *Cita-cita Korori: Gerakan Politik Orang Papua*, 97.

ditransformasikan sebagai gerakan kultural ketika berhadapan dengan Freeport dan militer Indonesia hingga saat ini. Pertautan spiritualitas dan resistensi masyarakat juga terlihat di masyarakat Biak tradisional hingga sekarang. Ketika Jepang menginvasi Pulau Biak pada masa Perang Dunia 2, *Koreri* sebagai gerakan perlawanan pun dimunculkan Kembali. Ideologi *Koreri* sendiri menempatkan Manarmakeri<sup>20</sup> sebagai Mesias yang dianggap telah pergi dan akan kembali untuk mendatangkan hidup yang berkelimpahan.

Ada resistansi yang mengakar dalam budaya dan identitasnya. Perlawanan ini muncul dalam interaksi dengan pihak luar yang dianggap mengancam nilai yang dipercaya dan dihidupi selama turun temurun. Meskipun kedatangan pihak luar tidak selalu memberikan dampak buruk, namun ketegangan nilai baru dan lama menjadi sumber resistansi. Dan budaya muncul tidak hanya sebagai simbol partisipasi namun sebagai wadah bagi terbentuknya aksi dan motif gerakan sosial masyarakat Papua.

### ***Internal Colonialism Era Soeharto (1968-1998)***

Pada masa pemerintahannya, Soeharto menjalankan berbagai agenda pembangunan mulai dari pembangunan ideologis dan politik, pembangunan ekonomi, serta pembangunan sosial dan budaya. Ketika menjabat sebagai presiden di tahun 1966, Soeharto mengubah kerangka kebijakan pembangunan dari semangat ‘revolusi’ era Soekarno menjadi ‘akselerasi dan modernisasi’.<sup>21</sup> Tujuan yang sebenarnya hendak dicapai oleh Soeharto adalah mengintegrasikan Indonesia dan masyarakatnya ke dalam sistem kapitalisme modern.

Dalam perspektif modernisasi, masyarakat tradisional dengan karakteristik seperti terikat dengan norma tradisional, hidup dalam keterisolasian, subsisten, memiliki relasi dan ketergantungan dengan alam, memiliki insentif non-ekonomi, dan ingin menjaga stabilitas hidup seperti ini mustahil dapat berkembang.<sup>22</sup> Oleh karena itu, perubahan nilai budaya, manusianya, maupun institusi pendukungnya juga perlu dimodernisasi. Cara pandang ini dengan sendirinya menyingkirkan Papua dari definisi ‘modern’. Stigmatisasi dan representasi Papua yang sudah terbangun sejak kolonialisme Belanda semakin memperkuat kebutuhan untuk ‘memodernkan’ suku bangsa di Papua.

Salah satu caranya adalah melalui transmigrasi. Dalam narasi pencetusnya, para transmigran dari Jawa dan Sumatera dianggap ‘lebih maju’ untuk mentransferkan pengetahuan pertaniannya kepada orang Papua yang dianggap ‘terbelakang’<sup>23</sup>. Akan tetapi, migrasi seperti ini juga membawa serta pengetahuan (*knowledge*), ide serta identitasnya. Interaksi antara Papua dan para transmigran pun tidak selalu dalam keadaan harmonis. Pembangunan yang dianggap Jawa- sentris ini membuat ketidaksukaan orang Papua pada migran Jawa. Mereka dianggap sebagai migran politik yang merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk ‘mengamankan’ wilayah Papua.<sup>24</sup>

Selain persoalan relasi sosial dan keamanan di balik program transmigrasi, perampasan lahan masyarakat adat juga menjadi isu mendasar hingga sekarang. Salah satu contohnya adalah di Keerom

<sup>20</sup> Figur sentral *Koreri* adalah lelaki tua bernama Yawi Nushado yang kemudian disebut Manarmakeri. Julukan ini berasal dari kata *mansar* (lelaki tua) dan *amaker* (kudisan). Manarmakeri kemudian melakukan *Rer* (perubahan) dengan membakar dirinya di api. Ia kemudian muncul dalam bentuk aslinya bukan sebagai orang tua yang mengalami sakit kulit, namun sebagai seorang pria muda yang gagah. Pergantian kulit Manarmakeri menunjukkan adanya proses pembaharuan dari generasi ke generasi yang berlangsung secara berkesinambungan.

<sup>21</sup> Noer Fauzi Rachman, *Land Reform & Gerakan Agraria Indonesia* (Yogyakarta: INSIST Press, 2017).

<sup>22</sup> Oekan S. Abdullah dan Dede Mulyanto, *Isu-Isu Pembangunan: Pengantar Teoretis* (Jakarta: PT. Gramedia, 2019).

<sup>23</sup> Bilveer Singh, *Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood*, 103.

<sup>24</sup> Max Auparay, *Ekonomi Politik Migrasi Penduduk di Papua*, ed. Alexander L. Griapon, (Jayapura: Kerjasama Penerbit Praja Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura, 2012), 15.

dan Kabupaten Jayapura. Masuknya gelombang transmigrasi menjadi semakin intens di Keerom sejak 1975-1990 an seiring pengembangan perkebunan kelapa sawit.<sup>25</sup> Untuk mendukung kebijakan transmigrasi, Gubernur Irian Jaya mengeluarkan Keputusan No.143/GIJ/1983 pada 26 Mei 1983 tentang penunjukan dan pencadangan tanah lokasi Perkebunan Inti Rakyat (PIR).<sup>26</sup>

Dalam wawancara pada Juli 2019, Servo Tuamis, Ketua Dewan Adat Keerom menjelaskan awal masuknya pembangunan jalan dan transmigrasi PIR.

*“Setelah program jalan masuk, lalu transmigrasi masuk. Positifnya jalan masuk membuka isolasi, supaya bantu ekonomi masyarakat, tapi hak-hak masyarakat adat secara perlahan-lahan tertindas... Tahun 1980an, masyarakat adat belum tahu proyek ini mengarah kemana. Tapi khusus untuk PIR ini luasan awalnya minta 500 hektar, namun dalam pernyataan pelepasan mencapai 50.000 hektar. Ini masalah sampai hari ini... Tanah ko (pemerintah) bagi untuk nusa bangsa (transmigran) PIR, ini terus kita punya status tanah adat hilang.”<sup>27</sup>*

Menurut Tuamis, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang pembangunan apa yang sedang dijalankan. Minimnya pengetahuan masyarakat ini dimanipulasi oleh pemerintah, sehingga mereka tidak hanya kehilangan tanahnya tapi juga tidak mendapatkan kompensasi yang layak. Hingga sekarang masyarakat adat Keerom masih menuntut konsesi atas pelepasan tanah mereka.

Selain kebijakan transmigrasi, Soeharto juga menjalankan penyeragaman kultur dalam proses *nation building*. Akibatnya, bahasa daerah dari tiap suku di Papua dilarang untuk dituturkan. Padahal Papua memiliki lebih dari 300 bahasa suku. Di institusi pendidikan formal pun, bahasa daerah Papua tidak boleh diajarkan.

Konstruksi rasial dan separatisme yang dilekatkan pada identitas Papua juga melegitimasi kekerasan pembangunan. Salah satu operasi yang menimbulkan trauma masyarakat hingga sekarang adalah Operasi Koteka pada April dan Juni 1977. Operasi Koteka dan berbagai kebijakan homogenisasi budaya lainnya adalah strategi mempermalukan (*humiliation strategy*) sehingga masyarakat merasakan *inferiority complex* dalam proses perubahan sosial itu. Bukan hanya keaslian budayanya dipaksakan hilang, tapi juga hilangnya pribadi dan rasa percaya diri sebagai kolektif dan individu. Soeharto memperlakukan Papua sebagai *“internal colony”* dimana sumber daya alamnya dieksploitasi tanpa berkonsultasi dan tanpa menyediakan kompensasi kepada pemilik sumber daya; tradisi lokal dan budayanya dihancurkan, tanah adat dirampas untuk kepentingan nasional; hak politik diabaikan karena alasan kesatuan nasional dan bahkan HAM diabaikan untuk alasan keamanan dan integrasi nasional.

Pembangunan dengan mantra modernisasi telah menjustifikasi berbagai program pembangunan diskriminatif yang tidak hanya memarginalkan secara material, tapi juga menghancurkan segenap identitas orang Papua. Untuk mempercepat penguasaan melalui pembangunan, struktur militer dan polisi yang bersifat teritorial berjalan bersamaan dengan struktur administrasi pemerintahan sipil. Struktur ini kemudian berfungsi sebagai mesin-mesin otoriter dalam memaksakan pembangunan.

<sup>25</sup> Jehan Paju Dale Cypry, *Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik: Analisis Kontra-Hegemoni dengan Fokus Studi Kasus di Manggarai Raya, NTT, Indonesia* (Labuan Bajo: Sunspirit, 2013), 14.

<sup>26</sup> Asrida Elisabeth, “Kala Masyarakat Tuntut Hak Ulayat Dari Perusahaan Sawit Negara di Keerom (Bagian 1),” *Mongabay Environmental News*, 12 Maret 2018. <https://www.mongabay.co.id/2018/03/12/kala-masyarakat-tuntut-hak-ulyat-dari-perusahaan-sawit-negara-di-keerom-bagian-1/>

<sup>27</sup> Wawancara Servo Tuamis, Ketua Dewan Adat Keerom, Juli 2019.

Pembangunan dan militerisme pun menjadi dua sisi mata uang. Dalam kontrol politis yang sangat kuat, ‘modernisasi’ dan operasi militer dilakukan secara bersamaan guna mematikan aspirasi politik yang masih hidup di kalangan masyarakat sipil maupun yang digerakkan oleh OPM.

### **Pembangunan Ekstraktif Pasca-Reformasi**

Pasca pemerintahan Soeharto, gerakan reformasi membawa harapan baru bagi kehidupan yang lebih demokratis. Akan tetapi, kebijakan pembangunan di Papua tetap memiliki karakter yang sama yakni *top down*, paternalistik, ekstraktif dan memarginalkan masyarakat yang dilakukan dalam konteks kekerasan yang berkelanjutan.

Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), kebijakan ekstraktif di Tanah Papua menjadi lebih ekspansif. Dengan adanya pemekaran provinsi Papua dan Papua Barat, SBY menjalankan skema baru pembangunan melalui rancangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional dan internasional. Salah satu program pengembangan pertanian dalam skema tersebut adalah *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) pada 2008 yang mengkonversi hutan alam dalam skala besar.

Pemerintah mengeluarkan PP No.26/2008, Perpres 5/2008 dan PP No. 18/2010 untuk memfasilitasi pengambilan lahan seluas hampir satu perempat dari total wilayah kabupaten Merauke tersebut. Jumlah total lahan yang rencananya akan diakuisisi adalah sekitar 1,282 juta ha<sup>28</sup>. Proyek ini dijalankan dengan merampas tanah-tanah masyarakat adat Marind-Anim melalui surat-surat perjanjian pengalihan tanah adat secara manipulatif. Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) minim diaplikasikan dalam proses akuisisi tanah. Masyarakat bahkan diperhadapkan dengan kekerasan oleh aparat keamanan sehingga persetujuan pelepasan lahan dilakukan dibawah tekanan dan tidak bebas seperti yang diamanatkan oleh FPIC.

Proyek MIFEE ini telah mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat Marind-Anim. John McDonnell menyebut MIFEE sebagai ‘*ecologically induced genocide*’ yang merupakan akibat dari praktek kapitalisme dan kolonialisme Indonesia terhadap masyarakat adat Papua<sup>29</sup>. Menurutnya, MIFEE merupakan bentuk genosida karena telah menghancurkan tidak hanya secara fisik, tapi juga budaya dan relasi ekologi suku Marind-Anim dengan tanah dan alamnya. Pembangunan eksploitatif ini tidak hanya menimbulkan deforestasi, polusi, dan penghancuran sumber-sumber air serta kelola pertanian secara lokal. Tapi juga secara ekologi fenomena perampasan lahan atas nama pembangunan nasional tersebut merupakan bentuk genosida karena memengaruhi “*capability of the environment to sustain life*.”<sup>30</sup>

Di masa pemerintahan Joko Widodo, Indonesia memasuki era percepatan infrastruktur. Berdasarkan Indeks Daya Saing Global 2014-2015 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, kondisi infrastruktur Indonesia berada di peringkat 56 dari 144 negara di dunia. Meskipun posisi ini naik empat tingkat dari tahun sebelumnya (2013-2014), namun Indonesia masih ada di peringkat yang lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Meski demikian, Indonesia adalah pasar yang sangat menjanjikan untuk investasi asing. Dengan Produk

<sup>28</sup> Dewi, R., “Gaining recognition through participatory mapping? The role of adat land in the implementation of the merauke integrated food and energy estate in Papua, Indonesia,” (2016). *ASEAS - Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 9, No1, (2016): 87-105. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2016.1-6>

<sup>29</sup> John E. Mc Donnell, “The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE): An Ecologically Induced Genocide of the Malind Anim,” *Journal of Genocide Research*. 2020 <https://doi.org/10.1080/14623528.2020.1799593>

<sup>30</sup> John E. Mc Donnell, “The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).



Domestik Bruto (PDB) yang menembus angka US\$ 26 triliun pada 2014, Indonesia telah menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara<sup>31</sup>. Dengan konsentrasi 53 persen penduduk tinggal di daerah perkotaan, kelas ekonomi menengah di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Oleh karena itu Indonesia menjadi pasar global yang sangat menjanjikan.

Untuk meningkatkan daya saing global, pemerintah menetapkan empat pilar utama pembangunan infrastruktur yaitu sektor energi, perhubungan dan maritim, telekomunikasi, kedaulatan pangan dan perumahan. Diperkirakan, kebutuhan dana untuk empat sektor pembangunan infrastruktur (2015-2019) tersebut adalah Rp. 5.542 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.<sup>32</sup>

Pembangunan infrastruktur itu dimulai dengan “membangun Indonesia dari pinggir” di mana Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi kawasan prioritas. Beberapa proyek pembangunan di kedua provinsi tersebut antara lain sektor perhubungan laut dan udara, pembangkit listrik dan kawasan industri (Lihat Tabel 1).

**Tabel 1.** Proyek Pembangunan Infrastruktur di Tanah Papua (2015-2019)<sup>33</sup>

<b>Papua</b>	<b>Papua Barat</b>
<p><b>Pembangunan PLTU Jayapura – Skouw (2x15 MW)</b></p> <p>Lokasi : Kota Jayapura.            Sektor : Pembangkit Listrik.            Status : Perencanaan.            Nilai Proyek : Rp. 510 Miliar.            Waktu Pekerjaan : 2010 – 2016.</p>	<p><b>Pengembangan Pelabuhan Teminabuan</b></p> <p>Lokasi : Teminabuan.            Sektor : Perhubungan Laut.            Status : Perencanaan.            Nilai Proyek : Rp. 261 Miliar.            Waktu Pekerjaan : 2011 – 2014.</p>
<p><b>Pembangunan PLTU Merauke – Gudang Arang (2x7 MW)</b></p> <p>Lokasi : Kabupaten Merauke.            Sektor : Pembangkit Listrik.            Status : Pembebasan Tanah.            Nilai Proyek : Rp. 390 Miliar.            Waktu Pekerjaan : 2009 – 2016.</p>	<p><b>Jalur Kereta Api Trans Papua (Lintas Sorong – Manokwari)</b></p> <p>Lokasi : Manokwari.            Sektor : Perkeretaapian.            Status : Studi Kelayakan .            Waktu Pekerjaan : 2014.</p>
<p><b>Pembangunan Pelabuhan Merauke</b></p> <p>Lokasi : Kabupaten Merauke.            Sektor : Perhubungan Laut.            Status : Tender.            Nilai Proyek : Rp. 1,5 Triliun.            Waktu Pekerjaan : 2012 – 2015.</p>	<p><b>Pembangunan Pelabuhan Sorong</b></p> <p>Lokasi : Sorong.            Sektor : Perhubungan Laut.            Status : Perencanaan.            Nilai Proyek : Rp. 1,5 Triliun.            Waktu Pekerjaan : 2013 – 2015.</p>

<sup>31</sup> Amal Ihsan, Dewi, Edy et al, *Megastruktur Indonesia*, 14.

<sup>32</sup> Amal Ihsan, Dewi, Edy et al, *Megastruktur Indonesia*, 19.

<sup>33</sup> Amal Ihsan, Dewi, Edy et al, *Megastruktur Indonesia*, 190-193.

<p><b>Pembangunan PLTU Jayapura 2 (2x15 MW)</b></p> <p>Lokasi : Kota Jayapura.  Sektor : Pembangkit Listrik.  Status : Perencanaan.  Nilai Proyek : Rp. 560 Miliar.  Waktu Pekerjaan : 2016 – 2019.</p>	<p><b>Kawasan Industri Teluk Bintuni</b></p> <p>Lokasi : Teluk Bintuni.  Sektor : Kawasan Industri .  Status : Perencanaan.  Nilai Proyek : Rp. 7 Triliun.  Waktu Pekerjaan : 2015.</p>
<p><b>Pengembangan Bandara Sentani</b></p> <p>Lokasi : Kabupaten Jayapura.  Sektor : Perhubungan Udara.  Status : Perencanaan.  Nilai Proyek : Rp. 565 Miliar.  Waktu Pekerjaan : 2015 – 2020.</p>	<p><b>Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok</b></p> <p>Lokasi : Sorong.  Sektor : Perhubungan Udara.  Status : Pengembangan.  Nilai Proyek : Rp. 195 Miliar .  Waktu Pekerjaan : 2014.</p>
<p><b>Pembangunan PLTU Biak (2x7 MW)</b></p> <p>Lokasi : Puncak Jaya.  Sektor : Pembangkit Listrik.  Status : Tender.  Nilai Proyek : Rp. 260 Miliar.  Waktu Pekerjaan : 2009 – 2018.</p>	<p><b>Pembangunan Faspel Laut Arar</b></p> <p>Lokasi : Kabupaten Manokwari.  Sektor : Perhubungan Laut.  Status : Perencanaan.  Nilai Proyek : Rp. 318 Miliar.  Waktu Pekerjaan : 2011 – 2014.</p>
<p><b>Pengembangan Pelabuhan Pomako</b></p> <p>Lokasi : Kabupaten Mimika.  Sektor : Perhubungan Laut.  Status : Tender.  Nilai Proyek : Rp 135 Miliar.  Waktu Pekerjaan : 2015 – 2018.</p>	<p><b>Pembangunan Jembatan Arar II</b></p> <p>Lokasi : Kabupaten Manokwari.  Sektor : Infrastruktur Pendukung.  Status : Tender.  Nilai Proyek : Rp. 150 Miliar.  Waktu Pekerjaan : 2014 – 2016.</p>
<p><b>Pengembangan PLTA Mamberamo</b></p> <p>Lokasi : Kab. Mamberamo Raya.  Sektor : Pembangkit Listrik.  Status : Perencanaan.  Nilai Proyek : Rp. 4 Triliun.  Waktu Pekerjaan : 2014 – 2016.</p>	

Selain percepatan infrastruktur, program penting lainnya yang berdampak langsung ke masyarakat adat adalah Reforma Agraria melalui penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Proyek TORA dianggap menjadi ancaman karena memperlancar penguasaan tanah skala besar dan deforestasi oleh perusahaan perkebunan dibandingkan penguasaan oleh masyarakat adat Papua sendiri<sup>34</sup>. Selain itu TORA dianggap tidak cocok dilaksanakan di Papua yang masih didominasi oleh masyarakat peramu dan berburu. Justru TORA akan lebih

<sup>34</sup> Franky Samperante, “Program TORA di Papua: Perampasan Tanah dan Deforestasi” *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial*, 38 (2020): 35-50.

menguntungkan kelompok masyarakat pendatang dan semakin mendiskriminasi masyarakat pemilik ulayat karena memaksakan mereka untuk bertransformasi menuju masyarakat pasar<sup>35</sup>.

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan belum ada perubahan signifikan dalam pendekatan pembangunan di Tanah Papua sejak Orde Baru hingga Jokowi. Pasca reformasi, ekspansi industri perkebunan sawit justru semakin meluas, khususnya pada masa pemerintahan SBY dan Jokowi (2015-2019). Yayasan Pusaka mencatat dalam kurun waktu 1997-2017, laju akuisisi tanah untuk kepentingan bisnis meluas di Provinsi Papua. Tercatat ada 1.580.847 ha tanah yang beralih kepemilikannya dari masyarakat adat kepada 62 perusahaan perkebunan<sup>36</sup>. Beberapa grup perusahaan besar diantaranya adalah *Salim Group*, *Pacific Interlink Group* dan *Korindo Group*. Perusahaan tersebut mendapatkan dukungan investasi dari beberapa bank di Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, UK, Japan, Swiss, Singapura, Amerika, Prancis, China, dan Belanda.

Tidak jauh berbeda dengan data Pusaka, Greenpeace International dalam laporannya “*Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua*” menyebutkan luasan tanah yang telah dilepaskan dari kawasan hutan untuk perkebunan di Provinsi Papua saja (hampir mencapai satu juta hektar (951.771 ha) dalam kurun waktu 2000- 2019. Greenpeace menyebutkan luasnya sebesar lebih dari satu setengah kali pulau Bali. Akibatnya, sepanjang dua dekade terakhir, tutupan hutan alam Tanah Papua berkurang 663.443 hektare: 29% terjadi pada 2001-2010 dan 71% 2011-2019<sup>37</sup>. Hal ini berarti, terjadi deforestasi 34.918 hektar per tahun, dengan deforestasi tertinggi terjadi pada 2015 yang menghilangkan 89.881 hektare hutan alam Tanah Papua.

Leonard Imbiri, Sekretaris Dewan Adat Papua mengatakan: “*Paradigma pembangunan sekarang adalah paradigma dolar yang berorientasi pada pasar yang menghancurkan kita (masyarakat adat). Itu paradigma kapitalis yang ujung-ujungnya melakukan penghisapan. Kalaupun ada sentra-sentra produksi, tujuannya untuk menjawab permintaan dari sistem kapitalis yang melakukan penghisapan.*”<sup>38</sup>

### Resistansi Kontemporer

Meskipun pembangunan infrastruktur terus dijalankan, namun resistansi tetap menjadi bagian penting yang menyertai. Resistansi di Tanah Papua dapat digolongkan dalam dua kategori yakni bersenjata (*armed resistance*) dan sipil (*civil resistance*).

Setelah integrasi, resistansi bersenjata digerakkan sepenuhnya oleh OPM. Tokoh-tokoh pendiri OPM seperti Frits Kirihio dan Awom adalah elit intelektual yang dihasilkan melalui program Papuanisasi di era Belanda.<sup>39</sup> Akan tetapi, pergerakan OPM menjadi sulit karena berbagai operasi militer yang digencarkan Suharto. Menurut Thaha Alhamid, Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP), resistensi Papua pada era ini masih merupakan kesadaran kritis individu yang disalurkan ke kelompok sehingga belum berakar sepenuhnya ke masyarakat sipil yang lebih luas.<sup>40</sup> Salah satu momen penting

<sup>35</sup> Erpan Faryadi dan Asrida Elisabeth, “Memeriksa Program TORA dan Perhutanan Sosial di Jayapura dan Keerom,” *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial*, 38 (2020): 197-210.

<sup>36</sup> Rassela, “*Mama Ke Hutan, Perempuan Papua dalam Kecamuk Kontestasi Sumber Daya Alam.*”

<sup>37</sup> Koalisi Indonesia Memantau, *Planned Deforestation: Forest Policy in Papua* (Jakarta: Koalisi Indonesia Memantau, 2021).

<sup>38</sup> Elvira Rumkabu, wawancara dengan Leonard Imbiri, Tokoh Adat, di Jayapura, 18 Januari 2020.

<sup>39</sup> Para penggerak resistansi Papua seperti yang membentuk OPM maupun pada masa reformasi hingga terbentuknya organisasi gerakan pro kemerdekaan adalah para intelektual muda. Hal ini menunjukkan peran pendidikan dalam transformasi gerakan resistansi di Papua.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Thaha Alhamid, 28 Februari 2017.

yang mengubah wajah resistensi Papua adalah terbunuhnya seniman Arnold Ap pada 1986 yang diikuti dengan pengungsian masyarakat ke Papua Nugini. Para intelektual muda Papua yang mendapatkan intimidasi dari rezim otoriter pun bergeser ke hutan dan melakukan perjuangan bersama OPM. Sedangkan beberapa tokoh nasionalis Papua menjadi diaspora di beberapa negara seperti Vanuatu dan Belanda.

Resistensi Papua pun mengkristal menjadi resistensi bersenjata melalui perang gerilya yang digerakkan oleh OPM dan diplomasi Papua di luar negeri yang digerakkan oleh para nasionalis. Memasuki era reformasi, resistansi Papua menjadi lebih inklusif, melakukan pergerakannya di dalam kota dan mendorong pendekatan tanpa kekerasan (*non-violence*).

Menurut Hardin Halidin, mantan aktivis gerakan tahun 1990 an, kepapuaan sangat inklusif dan mengizinkan setiap orang, baik Papua maupun non-Papua, untuk ada di dalamnya. Ia mencontohkan bagaimana Forum Mahasiswa Amber (FMA) dapat menjadi bagian dari pilar mahasiswa hasil Kongres Papua meskipun mereka adalah kelompok pendatang.<sup>41</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Agus Sumule<sup>42</sup>. Menurutnya ada beberapa faktor yang mendorong inklusivitas tersebut. *Pertama*, adanya momentum nasional reformasi dan kebijakan akomodatif Gus Dur. *Kedua*, terkonsolidasinya para intelektual Papua dengan berbagai gagasan kepapuaan dan cita-cita terhadap perubahan. Menurutnya pada saat itu, sudah ada tiga opsi yang dibahas secara internal dalam melihat Papua, yakni melalui otonomi khusus, merdeka, dan bentuk pemerintahan *one nation two system*. Dan *ketiga* adalah kerekatan tokoh-tokoh Papua pada masa itu karena persamaan latar belakang pendidikan melalui pola asrama.<sup>43</sup> Ada tuntutan masif dari berbagai komponen masyarakat dan gerakan untuk meminta pertanggungjawaban negara terhadap berbagai pelanggaran HAM masa lalu, baik karena operasi militer maupun karena berbagai praktek pembangunan yang dijalankan dengan kekerasan. Narasi '*penelusuran sejarah*' juga menjadi sangat dominan pada masa ini.

Era reformasi ditandai dengan munculnya Presidium Dewan Papua (PDP) sebagai aktor dominan. Legitimasi yang didapat oleh PDP berasal dari hampir semua komponen masyarakat sehingga menimbulkan *mass movement* di Papua. Bahkan, dalam pertemuan di tahun 2000 di Vanuatu, PDP dan OPM bertemu difasilitasi oleh Barack Sope.<sup>44</sup> Hasilnya, OPM memberikan otoritas dalam urusan politik kepada PDP. Hal ini merupakan transformasi penting dalam gerakan pro-kemerdekaan.

Akan tetapi konsolidasi berbagai organ politik dan bersenjata tersebut menjadi menjadi kekuatan yang mengancam. Pada 10 November 2001, They Eluay diculik dan dibunuh untuk meredam perjuangan nasionalis Papua.

Memasuki era Otonomi Khusus (pasca 2001), karakter perjuangan lebih inklusif dan terkoneksi dibandingkan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor. *Pertama*, adanya diversitas isu yang didorong, tidak hanya soal penentuan nasib sendiri secara eksternal tapi juga internal (*external and internal self determination*). *Kedua*, adanya interkoneksi yang lebih strategis antara resistensi di

<sup>41</sup> Wawancara dengan Hardin Halidin, Yayasan Ilalang, Mei 2020.

<sup>42</sup> Wawancara via telepon dengan Agus Sumule, Akademisi Universitas Papua (UNIPA), 18 Mei 2020.

<sup>43</sup> Dalam tulisan Bernarda Meteray juga dijelaskan bagaimana sekolah asrama yang dibangun oleh IS.Kijne pada masa kolonialisme Belanda telah menjadi wadah yang menumbuhkan benih-benih kepapuaan. Wacana sekolah asrama ini kemudian dimunculkan sekarang karena dianggap mampu memperkuat kesadaran tentang kepapuaan. Lihat Meteray, *Nasionalisme Ganda Orang Papua*.

<sup>44</sup> Menurut Thaha Alhamid, setelah PDP terbentuk, muncul pertanyaan mengenai posisi OPM dalam pergerakan perjuangan Papua, termasuk siapa yang merepresentasikan Papua di luar negeri. Dalam pertemuan di Port Vila tersebut, Seth Rumkorem (pimpinan OPM), memberikan otoritas dalam urusan politik kepada PDP (Wawancara Elvira Rumkabu dengan Thaha Alhamid, tanggal 27 Februari 2017).

dalam Papua, di luar Papua (Indonesia) dan internasional. *Ketiga*, penggunaan media sosial menjadi salah satu faktor yang memperkuat advokasi gerakan politik.

Penentuan nasib sendiri melalui referendum menjadi isu yang konsisten sejak 1960 an hingga sekarang. Menariknya dalam beberapa tahun terakhir, isu ketidakadilan sosial dan marginalisasi orang Papua dalam berbagai agenda pembangunan terus menguat. Interkoneksi kerja LSM lokal, nasional dan internasional dalam mendokumentasi berbagai proses dan hasil pembangunan ekstraktif tersebut berkontribusi pada menguatnya advokasi masyarakat adat. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya advokasi global terkait isu lingkungan. Di sisi lain, perjuangan masyarakat adat semakin terorganisir sebagai gerakan sosial.

Beberapa contoh resistensi kontemporer yang semakin menguat antara lain di Boven Digoel. Penancapan salib merah di sepanjang kampung dan batas-batas wilayah adat menunjukkan perlawanan masyarakat. Atribut religius dan kultural dipakai bersamaan dalam menolak pencaplokan tanah oleh korporasi. Prosesi pemasangan ‘sasi’ atau tanda larangan bagi beroperasinya korporasi, kegiatan surat menyurat, berpendapat di depan umum, peluncuran petisi, kampanye, hingga pemalangan adalah ekspresi mereka untuk menunjukkan otonomi komunalnya. Disisi lain, berbagai kampanye melalui platform media sosial pun terus digencarkan di antaranya “Papua Bukan Tanah Kosong”, “Selamatkan Tanah, Hutan, dan Manusia Papua”, “Gerakan Cinta Tanah Adat”, “Hutan adalah Mama” dan lain sebagainya adalah beberapa bentuk *counter* terhadap kebijakan pembangunan yang memperlakukan Papua sebagai tanah kosong.

Selain kesadaran yang terus meningkat di tingkat akar rumput, resistansi Papua juga semakin terkoneksi dengan audiens global. *Black Lives Matter* yang muncul sebagai sebuah gerakan global, diinterpretasikan kembali ke Indonesia sebagai *Papuan Lives Matter*. Dengan menggunakan platform media sosial, *#papuanlivesmatter*, berbagai situasi pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap masyarakat Papua pun mendapatkan atensi dari publik yang lebih luas. Di Indonesia, berbagai diskusi daring terkait rasisme terhadap Papua terus dilaksanakan sepanjang tahun 2020. Biasanya isu Papua dibicarakan dalam framing kekerasan maupun pelanggaran HAM. Namun rasisme telah menjadi sebuah framing baru yang lebih mudah mengkoneksikan isu-isu Papua lain ke audiens yang lebih luas.

Keberhasilan advokasi lokal, nasional dan global terlihat dalam tekanan yang diberikan kepada pemerintah Indonesia dalam proses hukum tujuh tahanan politik (Tapol) yang kemudian dikenal sebagai Balikpapan 7. *The International Indigenous Peoples Movement for Self Determination and Liberation* (IPMSDL) dan *the International League of People's Struggle* (ILPS) *Commission 10* – yang fokus pada isu masyarakat adat, kelompok minoritas dan *oppressed nations* meluncurkan petisi mendorong pembebasan ketujuh tahanan. Sekitar 94 organisasi dan lebih dari 2.200 individu dari berbagai negara di dunia turut berkontribusi. Selain kedua organisasi tersebut, dukungan dari masyarakat sipil di Indonesia pun cukup kuat dalam mendorong keberhasilan advokasi.

Interkoneksi gerakan global, nasional dan lokal menjadi sangat penting dalam melihat arah resistensi Papua ke depan. Kegagalan pembangunan dan kekerasan yang terus terjadi akan semakin memperkuat resistensi masyarakat adat . Berbagai persoalan pembangunan dan gerakan sosial akan diinterpretasikan oleh para aktor dalam agenda politik mereka.

*Papuan Lives Matter* yang menempatkan rasisme sebagai isu kemanusiaan telah menjadi pintu masuk bagi simpati internasional atas kompleksitas situasi Papua. Dukungan masyarakat internasional terhadap Papua dapat saja semakin beragam, termasuk pada isu yang tidak menyentuh langsung pada aspirasi merdeka. Jika tidak ada perubahan dalam pendekatan pembangunan dan penanganan Papua, maka resistensi lokal yang semakin terkoneksi akan semakin menguat di masa mendatang.

## **Kesimpulan**

Pembangunan yang dijalankan di Tanah Papua dapat dilihat sebagai sebuah relasi kuasa antara agen pembangunan (pemerintah, korporasi dan militer) sebagai penentu nasib dengan masyarakat adat yang ditentukan nasibnya. Karena pembangunan adalah sebuah paradigma politik, maka pemerintah menjalankannya sesuai dengan imajinasi dan kepentingannya. Masyarakat adat tidak diberikan kesempatan untuk menentukan model pembangunan yang mereka butuhkan. Konstruksi rasial terkait keterbelakangan Papua turut berkontribusi dalam eksklusi masyarakat adat dalam mengatur agenda pembangunan. Mereka tidak dilihat sebagai pelaksana pembangunan yang juga memiliki agensi dalam memutuskan bagaimana seharusnya pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya harus dijalankan.

Perjalanan panjang resistensi Papua menunjukkan adanya tuntutan perubahan dalam pendekatan pembangunan. Penelitian ini menyisakan pertanyaan penting tentang bagaimana sebenarnya model pembangunan yang tidak memarginalkan masyarakat adat Papua dan yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi mereka untuk menentukan sendiri pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya. Pola seperti ini hanya dapat diformulasikan dengan menempatkan agenda pembangunan ke dalam dua konteks penting yakni bahwa ada eksistensi masyarakat adat di Papua sehingga harus ada penghormatan terhadap otonomi komunalnya. Dan kedua, ada konteks konflik politik dan keamanan di Papua. Sehingga model pembangunan haruslah yang sensitif konflik dengan memperhitungkan interaksi antara berbagai aspek pembangunan baik yang bersifat fisik, sosial budaya maupun politik.

## Daftar Pustaka

- Al-Araf. *Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan Terhadap Kondisi HAM di Papua*. Jakarta: Imparsial, 2011.
- Al-Rahab, Amiruddin. "Presidium Dewan Papua: Berangkat dan Surutnya Gerakan Nasionalis Papua Merdeka 1999-2003." Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006.
- Alua, Agus. *Kongres Papua 2000. 29-Mei sampai 4 Juni*. Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2000.
- Anderson, B. *Papua's Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery*. Washington: East- West Center, 2015.
- Auparay, Max. *Ekonomi Politik Migrasi Penduduk di Papua*. Ed. Alexander L. Griapon. Jayapura: Kerjasama Penerbit Praja Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura, 2012.
- Chauvel, Richard. *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaption*. Washington: East-West Center, 2005.
- Christo (Ed) 2015, *ULMWP Sebuah Profil, Persatuan dan Rekonsiliasi Bangsa Melanesia di Papua Barat*, ULMWP.
- Cypri, Jehan Paju Dale. "Penjajahan Lewat Pembangunan di Papua." *Rappler*. 23 Mei 2016. <https://rappler.com/world/penjajahan-lewat-pembangunan-papua>.
- \_\_\_\_\_. *Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik: Analisis Kontra-Hegemoni dengan Fokus Studi Kasus di Manggarai Raya, NTT, Indonesia*. Labuan Bajo: Sunspirit, 2013.
- Elisabeth, Adriana, Muridan S. Widjojo, Rusli Cahyadi, dan Sinnal Blegur. *Pemetaan Peran dan Kepentingan Para Aktor Dalam Konflik di Papua*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2004.
- Elmslie, Jim dan Camellia Webb-Gannon. "A slow-motion genocide: Indonesian rule in West Papua." *Griffith Journal of Law & Human Dignity* 1, no. 2 (2014).
- Elmslie, Jim. "West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: "Slow Motion Genocide" Or Not?" *Centre for Peace and Conflict Studies*, working paper no. 11/1 (2010).
- Erpan Faryadi dan Asrida Elisabeth, "Memeriksa Program TORA dan Perhutanan Sosial di Jayapura dan Keerom," *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial*, 38 (2020): 197-210.
- Galtung, Johan. "Contemporary Conflict Resolution." Dalam *Contemporary Conflict Resolution*, Hugh Miall dan Oliver Ramsbotham eds. Cambridge: Tow Woodhouse Polity Press, 1999.
- Giay, Benny. *Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran Sekitar Emansipasi Orang Papua*. Jayapura: Deiyai/ Els-ham Papua, 2000.
- Hadi Syamsul, Rori Permadi U, Nurul Rochayati, Supriyanto, Suzanne Maria A, & Wahyu Addinata 2007, *Disintegrasi Pasca Orde Baru, Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, Centre for International Relations Studies (CIRes) & Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Haluk, Markus. *ULMWP: Persatuan dan Rekonsiliasi Bangsa Melanesia di Papua Barat*, ed. Tim Kerja ULMWP. Numbay (Jayapura): ULMWP Press, 2015.
- Hanita, Margaretha. *Cita-Cita Politik: Gerakan Politik Orang Papua*. Jakarta: UI Publishing, 2019.
- Hernawan, Budi, "Torture as a Mode of Governance: Reflections on the Phenomenon of Torture in Papua, Indonesia", Dalam "From Stone-Age to Real-Time": *Exploring Papuan Temporalities, Mobilities, and Religiosities*, eds. Martin Slama dan Jenny Munro. Canberra: Australian National University Press, 2015. London: Routledge, 2009.
- Horowitz, Donald L. *Ethnic Groups in Conflict*. London: University of California Press, 1985.
- Howard, M. C. *Vanuatu: The myth of Melanesian socialism*. Labour, Capital and

- Society/Travail, capital et société, 1983.
- International Fund for Agricultural Development, *Engagement with Indigenous Peoples Policy*, 2009
- Kivimaki, Timo. *Initiating A Peace Process in Papua: Actors, Issues, Process, and the Role of International Community*. Washington DC: East-West Centre, 2006.
- Koalisi Internasional untuk Papua (ICP) dan West Papua Netzwerk. *Hak Asasi Manusia di Papua 2017, Bagian 3: Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. 2005.
- Koalisi Indonesia Memantau, *Planned Deforestation: Forest Policy in Papua* (Jakarta: Koalisi Indonesia Memantau, 2021)
- Kusumaryati, V. "Pelebagaan Adat, Negara, dan Perjuangan bagi Penentuan Nasib Sendiri di Tanah Papua." *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial* 38 (2020), 13-34.
- MacLeod, J. *Merdeka and The Morning Star: civil resistance in West Papua*. Queensland: University of Queensland Press, 2017.
- Malinda, Rassela *Mama Ke Hutan*. Jakarta: Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, 2021.
- Mansoben, Johsz R. "Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan." Disertasi Doktoral, Leiden University and the Indonesian Institute of Sciences, 2014.
- Maubak, F. "Ritual Bakar Batu sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Horizontal pada Masyarakat Adat Suku Dani di Timika Papua." Disertasi Doktoral Program Studi Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2009.
- McGibbon, Rodd. *Plural Society in Peril: Migration, Economic Change, and the Papua Conflict*. Washington D.C.: East-West Center, 2004. <https://www.jstor.org/stable/resrep06523>
- \_\_\_\_\_. "Secessionist Challenges in Aceh and Papua: Is Special Autonomy the Solution?" *East-West Center-Washington, Policy Studies* 10 (2004).
- McMichael, 2012. "The Land Grab and Corporate Food Regime Restructuring." *Journal of Peasant Studies* 39, 3-4, (2012) 681-701.
- Meckstroth, Christopher. *The Struggle for Democracy: Paradoxes of Progress and the Politics of Change*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Meteray, Bernarda. *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012.
- Munro, Jenny. "Now we know shame": Malu and Stigma among Highlanders in the Papuan Diaspora." Dalam "*From Stone-Age to Real-Time": Exploring Papuan Temporalities, Mobilities, and Religiosities*, eds. Martin Slama dan Jenny Munro. Canberra: Australian National University Press, 2015.
- P2Politik-LIPI. *Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua*. eds. Cahyo Pamungkas dan Suma Riella Rusdiarti. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Peyon, A. Ibrahim. *Manusia Papua Negroid: Ras dan Ilmu dalam Teori Antropologi*. Jakarta: Kelompok Studi Nirentohon, 2012.
- Rutherford, Danilyn. *Laughing at Leviathan: Sovereignty and Audience in West Papua*. Chicago: University of Chicago Press, 2012.
- Rumkabu, Elvira, "ULMWP: Self-Determination, Diplomasi Pasifik, dan Dinamika Internasional" dalam *Oase Gagasan Papua Bermartabat Waa...Waa...Waa...* Jakarta: Imparsial, 2017.
- Samperante, Franky. "Program TORA di Papua: Perampasan Tanah dan Deforestasi." *Wacana Jurnal Transformasi Sosial* 38 (2020), 35-50.
- Savitri, L.A. "Menegarakan Tanah dan Darah Papua". *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial* 38 (2020), 5-12.
- Stasch, Rupert. "From Primitive Other to Papuan Self: Korowai Engagement with Ideologies of



- Unequal Human Worth in Encounters with Tourists, State Officials and Education.” Dalam *“From Stone-Age to Real-Time”: Exploring Papuan Temporalities, Mobilities, and Religiosities*, eds. Martin Slama dan Jenny Munro. Canberra: Australian National University Press, 2015.
- Strelan, John dan Jan. A. Godschalk. *Kargoisme di Melanesia: Suatu Studi tentang Sejarah dan Teologi Kultus Kargo*. Jayapura: Pusat Studi Irian Jaya, 1989.
- Tebay, Neles. *Dialog Jakarta – Papua: Sebuah Perspektif Papua*. Jayapura: SKPKC Jayapura, 2009.
- Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura. *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi: Dasar Menangani Konflik di Papua*. Jayapura: SKPKC, 2006.
- Timmer, Jaap. “Decentralization and Elite Politics in Papua.” *Paper diskusi pada Research School of Pacific and Asian Studies*, Australia National University (ANU), 2005.
- Tim Kemanusiaan Untuk Kasus Kekerasan Terhadap Tokoh Agama Di Kabupaten Intan Jaya, *Duka Dari Hitadipa*, Jayapura, 2020
- Vinshagen, *A Theory of Nonviolent Action: How Civil Resistance Works*. London: Zed Books, 2015
- Widjojo, Muridan S. “Etnonasionalisme Papua Dalam Era Demokratisasi” dalam *Nasionalisme, Demokratisasi, dan Sentimen Primordial di Indonesia: Problematika Etnisitas versus Keindonesiaan (Studi Kasus Aceh, Papua, Riau dan Bali)* ed. Firman Noor. Jakarta: LIPI Press, 2008.
- \_\_\_\_\_. ed. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerjasama dengan KITLV, 2010.

#### Data Wawancara:

- Wawancara Thaha Alhamid, Sekretaris Presidium Dewan Papua, di Jayapura, 27 Februari 2017.
- Wawancara dengan Servo Tuamis, Ketua Dewan Adat Keerom, Juli 2019 di Keerom.
- Wawancara dengan Fadhal Alhamid, Aktivist Gerakan Mahasiswa Era Orde Baru dan Ketua II DAP, April 2020 di Jayapura.
- Wawancara *via* telepon dengan Frangky Samperante, Direktur Yayasan Pusaka, 3 Mei 2020.
- Wawancara dengan Hardin Halidin, Aktivist Gerakan Mahasiswa Era Reformasi, 7 Mei 2020 di Jayapura.
- Wawancara *via* telepon dengan Agus Sumule, Tokoh Intelektual Papua dan Akademisi Universitas Papua (UNIPA), 18 Mei 2020.
- Wawancara *via* telepon dengan Rasella Melinda, Aktivist dan Penggiat Isu Masyarakat Adat di Boven Digoel, 22 Mei 2020.
- Wawancara dengan Leonard Imbiri, Sekretaris Umum Dewan Adat Papua, 8 Juni 2020 di Jayapura.